

DEWANPERS

# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

**KOMUNIKASI PUBLIK  
MASA PANDEMI**

PEMBEKALAN  
WARTAWAN MANADO  
**MENJELANG UKW**

**PERSIAPAN ANUGERAH  
DEWAN PERS 2021**

# MEDIA MASIH DIPERCAYA MASYARAKAT



# PUBLIK MERESPONS POSITIF PEMBERITAAN COVID-19 DI MEDIA MASSA

Jakarta, Dewan Pers

**P**ublik menunjukkan respons positif terhadap kinerja pers sebagai komunikator kesehatan publik dan dalam memberitakan COVID-19. Respons positif itu dikarenakan pers mengutip sumber-sumber terpercaya, seperti otoritas kesehatan baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga turut berkontribusi bagi upaya melawan penyebaran misinformasi dan disinformasi.

Pers juga disebut mampu memisahkan pernyataan politik dan pernyataan ilmiah, dan menampilkan imaji berupa foto atau visualisasi data dengan akurat terkait COVID-19. Selain itu media sosial merupakan platform media massa yang paling populer terutama di kalangan kelompok usia muda dalam mencari pemberitaan COVID-19.

Demikian butir-butir penting dari dalam acara Diskusi Hasil Survei Dewan Pers dengan topik “Persepsi Publik Terhadap Pemberitaan COVID-19 di Media” secara daring dan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Dewan Pers Jum’at (30/7) siang. Penelitian tersebut merupakan hasil kerjasama Dewan Pers bersama dengan tim riset Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

Acara yang dibuka oleh Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan dipandu Anggota Dewan Pers Asep Setiawan ini

menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar dan Tim Peneliti dari Universitas Multimedia Nusantara yang diwakili oleh Albertus Prestianta. Sedangkan kepala bidang komunikasi Satgas Penanganan Covid-19 Hary Trianto menjadi penanggap acara diskusi.

## MEDIA KOMUNIKATOR KESEHATAN

“Pemberitaan mengenai COVID-19 di media massa sudah memadai, masyarakat mempersepsikan media sebagai agen komunikator kesehatan publik. Masyarakat juga mempersepsikan media adalah ujung tombak dalam melawan penyebaran misinformasi dan disinformasi,” kata Albertus Prestianta yang merupakan tim peneliti dari UMN.

Meskipun respons umumnya positif, namun, rata-rata kepuasan menurun di kelompok usia muda, yaitu Generasi Z (11-25 tahun), yang juga diidentifikasi sebagai kelompok usia yang paling banyak merujuk pada media sosial untuk mencari informasi terkait COVID-19. Ada indikasi bahwa kelompok usia muda ini belum sepenuhnya yakin pada kinerja pers atau bahwa media massa telah memenuhi kebutuhan mereka akan informasi terkait COVID-19. Sebaliknya, Generasi Baby Boomers (57-75 tahun) merupa-



kan kelompok usia yang menunjukkan respons paling positif terhadap kinerja pers dalam melaporkan COVID-19.

Temuan lain dari penelitian ini adalah media sosial merupakan platform media massa yang paling populer, terutama di kalangan kelompok usia muda, dan berpeluang menjadi platform paling efektif bagi media massa arus utama dan otoritas kesehatan untuk mengomunikasikan informasi resmi dan berita terkait COVID-19. Platform media sosial berjejaring yang paling populer di dunia, termasuk Facebook, Instagram, YouTube, Google dan Line Today, termasuk dalam 20 besar nama “media” yang dirujuk responden. Temuan ini menunjukkan bahwa terminologi “media” tidak lagi diasosiasikan secara eksklusif dengan institusi pers dalam konteks pemberitaan COVID-19.

“Pemberitaan media terbukti mampu mengubah perilaku dan emosi masyarakat. Ini terlihat bahwa kini gaya hidup lebih sehat dan mengadopsi teknologi digital dalam keseharian. Selain itu, masyarakat letih akibat pemberitaan, mayoritas responden membatasi diri dalam mengonsumsi informasi Covid-19, baik dalam hal durasi mau-

**▲ KETUA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK SATUAN TUGAS COVID-19, HERY TRIANTO MEMBERIKAN TANGGAPAN DALAM DISKUSI HASIL SURVEY DEWAN PERS DENGAN TEMA “PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PEMBERITAAN COVID-19 DI MEDIA” SECARA DARING DAN LIVE STREAMING DI KANAL YOUTUBE DEWAN PERS. (30/7). (FOTO: DOK.DEWAN PERS)**



*Dengan segala macam carut-marut informasi yang beredar melalui media sosial. Kita mendapatkan informasi yang beredar belum tentu benar dan media sangat sangat memegang peranan untuk menangkal berita-berita terkait dengan COVID -19.”*

pun jumlah artikel yang dibaca,” ungkap Albertus.

Masyarakat membutuhkan informasi yang berorientasi kepada solusi dan membangun optimisme. Mereka sudah berharap media tidak hanya memberitakan *problem*, namun juga menggali cara menyelesaikan masalah. Memberi inspirasi dan wawasan yang bisa diterapkan sehingga bisa membangun optimisme. Dalam kesimpulan penelitian juga terungkap bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi vaksin dan relevan seputar pandemi.

“Informasi vaksin sangat dibutuhkan oleh publik, responden mengharapkan agar berita yang muncul relevan dengan situasi masing-masing daerah (tidak Jakarta Sentris),” pungkasnya.

Ratusan peserta hadir di platform Zoom dan disiarkan live streaming Kanal YouTube Dewan Pers dari kalangan insan pers, akademisi, konstituen Dewan Pers dan masyarakat umum.

## MASIH DIPERCAYA

Penelitian ini ternyata juga disambut baik oleh tim Satgas Penanggulangan Covid-19 karena ternyata me-





dia masih dipercaya oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat.

“Saya terus terang saya cukup senang ternyata kepercayaan terhadap media *mainstream* (arus utama) kalau kita lihat di sini ini sangat signifikan dan kecenderungan mengalami kenaikan kendati kalau dari sisi demografi mulai ada atau bahkan banyak orang kecenderungan untuk mendapatkan informasi pertama dari media sosial,” ujar Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Hery Trianto dalam tanggapannya.

“Dengan segala macam carut-marut informasi yang beredar melalui media sosial maupun group chat aplikasi *Whatsapp*. Kita mendapatkan informasi yang beredar belum tentu benar dan media sangat sangat memegang peranan untuk menangkal berita-berita terkait dengan COVID-19,” jelas Hery.

“Kami melakukan survei melalui Badan Pusat Statistik pada akhir-akhir ini yang menyatakan bahwa 17% masyarakat Indonesia itu tidak percaya dengan adanya pandemi COVID-19,” ujarnya.

**A** SAMBUTAN DARI KETUA DEWAN PERS MOHAMMAD NUH DALAM DISKUSI HASIL SURVEY DEWAN PERS DENGAN TEMA “PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PEMBERITAAN COVID-19 DI MEDIA” SECARA DARING DAN DISIARKAN SECARA LIVE STREAMING MELALUI KANAL YOUTUBE DEWAN PERS JUM’AT (30/7). (FOTO: DEWAN PERS)

*Pers juga disebut mampu memisahkan pernyataan politik dan pernyataan ilmiah, dan menampilkan imaji berupa foto atau visualisasi data dengan akurat terkait COVID-19.*

Dengan kontribusi media *mainstream* dalam menyampaikan informasi tentang covid-19 kepercayaan orang dan pengertian masyarakat tentang pandemi semakin baik dan mereka sudah tidak terlalu resisten terhadap informasi-informasi terkait pandemi.

## TINGKATKAN FUNGSI MEDIA

Para akademisi juga memberikan apresiasi dengan penelitian ini. Hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dadang Hidayat. “Saya melihat dari kesimpulannya bahwa media itu masih banyak dipercaya oleh masyarakat ini cukup baik. Bahwa perlu ada pendalaman selain hanya menyampaikan informasi, media punya fungsi sebagai *to educate* dan *to influence* ini masih sangat kurang,” ujar Dadang dalam tanggapannya.

“Benar saja tidak cukup, tapi juga harus layak secara kuantitatif dan kualitatif apalagi informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Misalnya ada realitas banyak masyarakat yang ingin divaksin tapi tidak tahu aksesnya ke mana?. Informasi-in-



formasi di media ini lebih bersifat umum. Keberadaan media-media lokal mestinya bisa menjawab kebutuhan informasi masyarakat sekitar,” lanjut Dadang.

“Jika memang tidak didapatkan informasi atau kebutuhan informasi itu dari media-media yang ada pada akhirnya masyarakat mencari sumber informasi di media sosial atau di situs-situs tertentu yang bukan media, Diharapkan media bisa lebih bukan sekedar hanya menyampaikan informasi peristiwanya saja tapi juga mencari sebabnya,” tambahnya.

Kasus seperti misalnya tentang kelangkaan oksigen dan obat-obatan tidak hanya mengenai kelangkaan oksigen atau obatnya tapi menelusuri apa yang menyebabkan dan segala macamnya. “Wartawan jangan hanya menunggu penangkapan polisi lalu memberitakan peristiwanya. Setelah penangkapannya lalu apa?,” jelas Dekan Fikom Unpad Dr. Dadang Hidayat.

## PROGRAM DEWAN PERS

Paparan dalam acara Diskusi Ha-

**▲** AGGOTA DEWAN PERS, AHMAD DJAUHAR MEMBERIKAN TANGGAPAN DALAM DISKUSI HASIL SURVEY DEWAN PERS DENGAN TEMA “PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PEMBERITAAN COVID-19 DI MEDIA” SECARA DARING DAN DISIARKAN SECARA LIVE STREAMING MELALUI KANAL YOUTUBE DEWAN PERS JUM’AT (30/7). (FOTO:DEWAN PERS)



*Dewan Pers bersama satgas penanganan COVID-19 juga menyelenggarakan jurnalisme perubahan perilaku ini sungguh langkah yang cukup bagus.”*

sil Survei Dewan Pers dengan topik “Persepsi Publik Terhadap Pemberitaan Covid-19 di Media” ini bagian dari kegiatan penelitian dewan pers merupakan satu rangkaian untuk sebenarnya pelaksanaannya adalah pada semester pertama 2021 tetapi karena satu dan lain hal terpaksa agak sedikit diundur sampai ke bulan Juli.

“Banyak kegiatan riset yang diselenggarakan oleh Dewan Pers karena memang punya kewajiban untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau dinamika kehidupan pers. Dan ini juga amanat dari undang-undang pers bagaimana Dewan Pers harus melaksanakan serangkaian penelitian untuk menjaga iklim daya hidup pers itu sendiri,” ujar Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar dalam tanggapannya.

Dari berbagai penelitian ini nanti akan diharapkan dapat ditarik kesimpulan bahwa bagaimana harus bersikap, harus melakukan langkah-langkah apa?. Perusahaan pers baru bermunculan tapi apakah mereka mampu memenuhi kaidah yang harus dipenuhi oleh perusahaan pers yang sesungguhnya.



“Dewan Pers bersama satgas penanganan COVID-19 juga menyelenggarakan jurnalisme perubahan perilaku ini sungguh langkah yang cukup bagus. Respon masyarakat dan respons teman-teman pers cukup antusias mengikutinya ini diperpanjang tahun ini menjadi sampai 8 bulan berakhir nanti pada Desember 2021,” kata Ahmad Djauhar.

Berita dari peserta ceritanya cukup inspiratif ada yang menggugah dan sebagainya untuk menggerakkan masyarakat agar mereka selain melaksanakan protokol kesehatan. Salah satu bukti perubahan perilaku yang didorong oleh masyarakat tersebut oleh wartawan di lapangan beritanya sangat variatif tidak sedikit dari ribuan karya jurnalistik

**INFORMASI-INFORMASI DI MEDIA MASIH DIPERCAYA MASYARAKAT TENTUNYA DENGAN PENDALAMAN BERITA YANG MENDALAM.**  
(FOTO: DEWAN PERS)

tersebut yang bagus atau bahkan sangat bagus.

“Agar bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat dan sebagainya untuk melakukan perubahan perilaku secara intensif persoalan yang berkaitan dan pandemi COVID-19 ini dengan cara tetap menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas jurnalistiknya,” tambahnya.

Dewan Pers berharap dalam membuat berbagai riset berkaitan dengan media ini sama-sama mendukung dan bermanfaat bagi semua pihak. Riset ini prinsip yang relatif bagus mencakup seluruh Indonesia. Dewan Pers masih menunggu dua laporan penelitian mengenai pers di Indonesia pada masa pandemi khususnya.

*(Imam Suwandi)*



**DEWANPERS**

**Berita Dewan Pers ETIKA:** Terbit Bulanan, ● Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad NUH, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya, ● Kepala Sekretariat: Syaefudin, ● Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Tim Redaksi: Heru tjahjo Soewardjo, Shanti Ruwyastuti, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Fadli, Imam Suwandi, Iwhan Gimbal.

**Alamat Redaksi:** Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

📧 dewanpers @officialdewanpers 📺 Dewan Pers 📺 Dewan Pers

Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



# KOMUNIKASI PUBLIK MASA PANDEMI

Oleh: **Shanti Ruwyastuti**  
TENAGA AHLI DEWAN PERS



**T**idak terasa sudah satu setengah tahun Indonesia didera oleh pandemi virus corona. Dalam kurun waktu tersebut, Pemerintah dan pers bahu membahu mengedukasi publik tentang berbagai aspek COVID-19.

Menurut survei Dewan Pers dan Universitas Multimedia Nusantara “Persepsi Publik terhadap Pemberitaan COVID-19 di Media” yang diselenggarakan pada bulan Mei dan Juni 2021, media massa di Indonesia berhasil menjalankan fungsi komunikasi kesehatan masyarakat dan edukasi publik selama pandemi COVID-19. Secara umum, responden menunjukkan respons positif saat mengevaluasi kinerja pers sebagai komunikator kesehatan publik dan dalam melaporkan COVID-19.

Salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja pers dalam peliputan dan pelaporan COVID-19 adalah mengutip sumber-sumber terpercaya seperti otoritas kesehatan, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga turut berkontribusi bagi upaya melawan penyebaran misinformasi dan disinformasi. Kriteria lain termasuk memisahkan pernyataan politik dan pernyataan ilmiah serta dan menampilkan imaji berupa foto atau visualisasi data dengan akurat terkait COVID-19.

Hasil survei juga menunjukkan, pemberitaan media massa tentang COVID-19 memiliki dampak positif terhadap perubahan perilaku responden, yang mengadopsi



▲ PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG COVID-19 MEMILIKI DAMPAK POSITIF TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU RESPONDEN, YANG MENGADOPSI GAYA HIDUP YANG LEBIH SEHAT DAN HIGIENIS.  
FOTO: DEWAN PERS

gaya hidup yang lebih sehat dan higienis. Responden juga mengadopsi teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari untuk mencegah kontak langsung dengan banyak orang.

Hasil survei ini membesarkan hati para jurnalis, yang tetap melakukan peliputan pada masa pandemi, walaupun membahayakan keselamatan jiwa. Banyak pemimpin redaksi yang terpaksa membatasi mobilitas anak buahnya di lapangan, padahal fakta lapangan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pengumpulan berita. Alhasil, sebagian peliputan dilakukan secara daring walaupun tidak optimal karena hampir selalu berlangsung searah dari narasumber kepada wartawan dan tidak ada waktu tanya jawab.

Tidak optimalnya peliputan secara daring ini kian parah dengan riuh rendahnya anggota Kabinet Indonesia Maju yang seolah berlomba memberikan pernyataan kepada pers namun substansinya

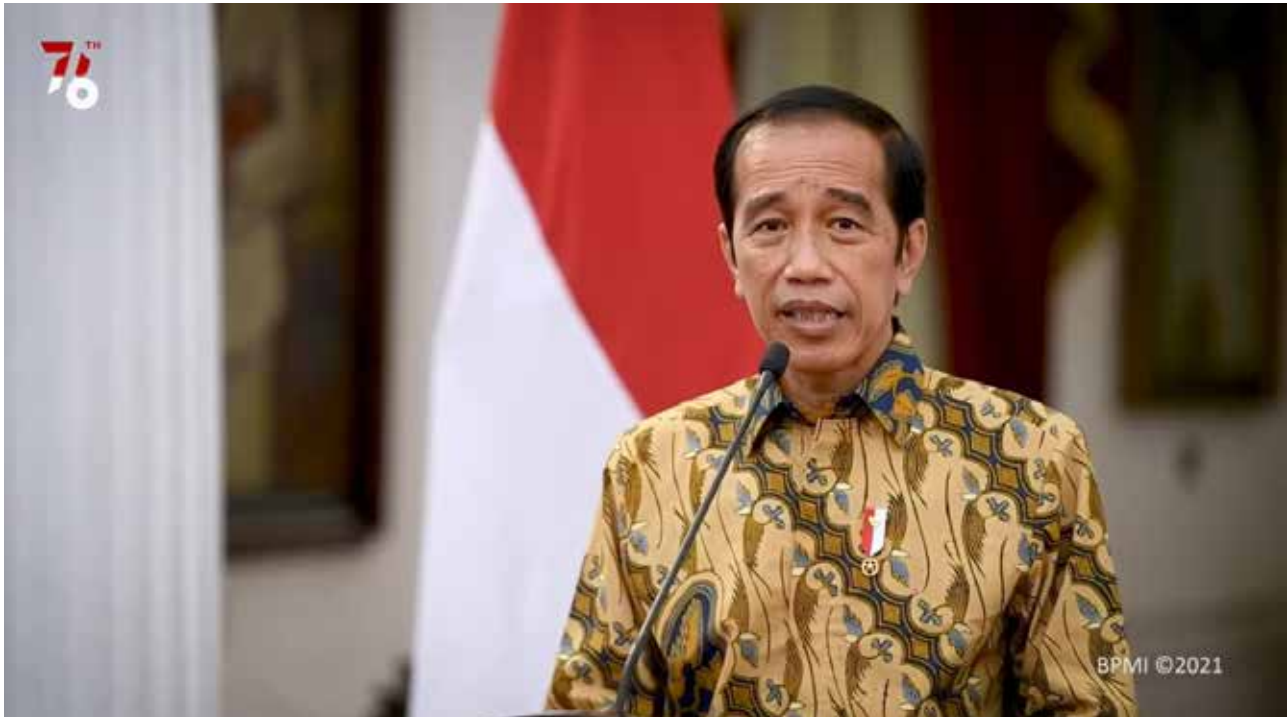


*Ini daruratnya sudah darurat militer, hanya musuhnya memang bukan militer konvensional tapi ‘pasukan’ tidak terlihat,”*

bertolak belakang. Contohnya pada awal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali mulai 3 Juli 2021, Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut Indonesia sudah dalam situasi darurat militer menghadapi pandemi. “Ini daruratnya sudah darurat militer, hanya musuhnya memang bukan militer konvensional tapi ‘pasukan’ tidak terlihat,” katanya.

Dengan alasan itu, menurut Muhadjir, Presiden Joko Widodo telah menerjunkan TNI dan Polri untuk ikut menangani COVID-19 karena sudah tidak bisa dihadapi dengan penanganan biasa. Tepatkah analogi tersebut? Mengapa bukan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang telah ditunjuk Presiden untuk memimpin PPKM Darurat di Jawa dan Bali, yang mengeluarkan pernyataan tentang status pelaksanaan tersebut? Ternyata, menurut Menko Marves Luhut, TNI dan Polri diterjunkan untuk melakukan testing dan tracing penderita





**▲** PRESIDEN JOKOWI SAAT MEMBERIKAN PERNYATAAN TERKAIT PERKEMBANGAN TERKINI PPKM DI ISTANA MERDEKA, PADA SABTU (25/7)  
 SUMBER : YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

COVID-19 bekerjasama dengan puskesmas-puskesmas. Dalam pelaksanaan PPKM Darurat selanjutnya, pers kemudian tahu bahwa TNI dan Polri juga oleh Presiden diminta memvaksinasi masyarakat umum agar target yang diminta Presiden satu juta orang per hari pada bulan Juli bisa tercapai.

Komunikasi publik lain yang juga membuat pers seperti kecolongan dengan tiba-tiba meledaknya kenaikan pasien COVID-19 pada bulan Juli adalah minimnya informasi tentang jumlah masyarakat umum yang telah divaksinasi per hari. Sampai dengan bulan Juni, data lengkap masyarakat sudah divaksin hanya ada di dashboard Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Ketika penulis minta tautannya kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), disarankan agar melihat di website Kemenkes karena dashboard tersebut tidak terbuka untuk umum.

Padahal data grafik yang sudah divaksin di dashboard KPCPEN lebih detail daripada yang ada di Kemenkes karena data Kemenkes hanya tiga golongan yang bisa dilihat yaitu tenaga kesehatan, pelayan publik dan kaum lanjut usia. Padahal juga pada bulan Mei, masyarakat umum usia 18-59 tahun disusul pada bulan Juni usia remaja 12-17 tahun, sudah mulai divaksinasi. Alangkah baiknya jika data tersebut sudah bisa mulai diakses pers pada bulan Juni sehingga mengantisipasi edukasi kepada publik ten-

tang kemungkinan drastisnya penderita COVID-19 akibat varian Delta karena jumlah masyarakat umum yang sudah divaksin masih di bawah 25%.

Yang terakhir adalah tentang tidak transparannya data dari pemerintah-pemerintah daerah kepada pers akibat para pimpinannya menutup-nutupi kondisi riil pandemi untuk mendapatkan rapor bagus dari pemerintah pusat. Penulis merasa aneh mengapa Jawa Timur pada awal PPKM Darurat tidak pernah masuk dalam tiga besar provinsi yang tingkat penularan COVID-nya. Padahal di dalam sebuah webinar, epidemiolog Unair Dr. Windhu Purnomo sudah memperingatkan bahwa data di Surabaya dan Jawa Timur "*underreported*". Menurut Windhu, data penderita COVID-19 di Surabaya sebenarnya 14 kali lipat dari yang dilaporkan dan di Jawa Timur sebenarnya delapan kali lipat dari yang dilaporkan.

Di dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti pandemi saat ini, masyarakat amat membutuhkan kepastian informasi. Pemerintah diharapkan bisa melakukan komunikasi publik yang lebih baik lagi ke depannya. Dengan kejelasan dan kekonsistenan komunikasi publik tersebut, pers akan terbantu menulis atau menayangkan berita yang akurat dan menentramkan publik. Satu setengah tahun pandemi ini cukup sudah untuk masa belajar bagi Pemerintah agar berkomunikasi dengan jelas dengan data yang transparan.●

# PEMBEKALAN WARTAWAN MANADO MENJELANG UKW

Oleh: **ASEP SETIAWAN**  
ANGGOTA DEWAN PERS

**D**ewan Pers memiliki target sekitar 1.700 wartawan di Indonesia akan mengikuti program Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Adanya UKW yang diselenggarakan khusus oleh Dewan Pers yang dilaksanakan oleh lembaga uji merupakan komitmen dalam meningkatkan kualitas wartawan. Dari data yang ada di situs Dewan Pers sedikitnya terdapat 17.643 yang telah mendapatkan kartu UKW mulai dari jenjang muda sampai utama.

Salah satu persiapan sebelum menempuh program UKW ini adalah mengikuti pembekalan oleh Dewan Pers selama setengah hari untuk setiap provinsi yang dilakukan secara daring. Salah satu pembekalan yang berlangsung bulan Juli adalah bersama para wartawan dari Manado, Sulawesi Utara, tanggal 7 Juli 2021.

Dalam pembekalan yang biasanya berlangsung mulai pukul 08.00 pagi sampai 15.00, peserta yang jumlahnya sekitar 50 orang mengikuti tiga sesi materi. Materi pertama terkait dengan filosofi jurnanisme kemudian materi kedua Kode Etik Jurnalistik

& Hukum Pers dan materi terakhir Liputan Investigasi. Sebelum acara berlangsung peserta mendapatkan “pre-test” dan diakhiri dengan “post-test”.

Pembekalan ini ditujukan untuk mengkondisikan para wartawan dengan prinsip-prinsip dasar jurnalistik dan juga kode etik jurnalistik sehingga saat UKW yang biasanya berlangsung sekitar dua hari dapat dilalui dengan baik. Para wartawan ini umumnya sudah terbiasa menulis berita, mengikuti jumpa pers, melakukan wawancara bahkan merencanakan pemberitaan dalam rapat-rapat redaksi. Namun demikian ketika UKW berlangsung diantara para wartawan ini mungkin kurang lagi memperhatikan landasan kerja di ruang redaksi baik dalam koordinasi maupun dalam liputan.

Oleh karena itulah materi pertama bagi calon peserta ini menitikberatkan pada pemahaman yang tepat mengenai filosofi jurnanisme yang menjawab pertanyaan dasar mengenai mengapa jurnanisme ini hadir di dunia. Materi pertama ini disusun oleh wartawan senior dan Tenaga Ahli



ANGGOTA DEWAN PERS, ASEP SETIAWAN MEMBUKA SEKALIGUS MEMBERIKAN MATERI MENGENAI FILOSOFI JURNALISME SAAT PELATIHAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN UNTUK PROVINSI SULAWESI UTARA SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA RABU (7/7).

FOTO: DEWAN PERS

Dewan Pers Marah Sakti Siregar. Dalam paparan yang disusun oleh Marah Sakti Siregar ini dimulai dari pengertian jurnalisme yang disebut sebagai produksi dan distribusi laporan peristiwa berdasarkan fakta dan didukung oleh bukti-bukti. Jurnalisme adalah kegiatan mengumpulkan, menguji, menciptakan dan mempresentasikan berita dan informasi.

Kemudian dijelaskan bahwa istilah jurnalisme itu sendiri dapat dilacak dari perjalanan sejarah yang dapat dicatat sejak zaman Romawi Kuno masa pemerintahan Julius Caesar 100 sebelum Masehi. Kaisar memerintahkan dimulainya kebiasaan baru bahwa semua kegiatan penting sehari-hari dicatat dalam *Annals* (papan tulis. Papan pengumuman informasi dari Kaisar untuk rakyat ini disebut *Acta Diurna*. *Acta Diurna* mulai ditulis dan diumumkan pertama kali pada tahun 59 SM. Kegiatan penulisan catatan ini makin meluas. Maka munculah para penulis yang disebut “*Diurnarii*”. Muncul istilah “*Diurnalis*” dan “*Journalist*” (jurnalis

atau wartawan). Kemudian berkembanglah jurnalisme modern yang mulai berkembang di Jerman kemudian ke Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.

Oleh karena itu kemudian dibahas tentang hakikat pekerjaan wartawan mencari dan mempublikasi berita. Apa itu berita sesungguhnya? Berita harus faktual dan menyangkut kepentingan umum (publik). Apa itu faktual? Apa itu kepentingan publik? Disinilah para wartawan diberikan pemahaman dasar sehingga menjalankan profesinya dengan kesadaran penuh mengenai pentingnya profesi ini dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian juga dibahas tentang menyajikan informasi dan/atau berita kepada publik. Hal ini penting untuk mencerdaskan masyarakat. Lalu buat apa? Dalam sistem demokrasi, masyarakat aktif terlibat ketika memilih pemimpin, dalam penyusunan setiap kebijakan publik, dan mengawasi implementasinya. Semua itu dibutuhkan informasi yang benar, objektif dan tidak bias. Jika informasi

atau berita tercemar, menyesatkan, putusan masyarakat pun akan melencong.

Dalam pemaparan tentang hal-hal mendasar mengenai jurnalisme dibahas pula bahwa pekerjaan wartawan sangat berhubungan dengan kepentingan publik. Wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak masyarakat, dan musuh penjahat kemanusiaan (para koruptor dan politisi busuk). Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya, wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers.

Dengan memahami hal-hal mendasar mengenai apa jurnalisme dan apa tugas jurnalis diharapkan para wartawan lebih siap menghadapi UKW ini. Pemahaman yang fundamental tentang peran dan fungsi jurnalis ini akan memberikan landasan yang kuat untuk meningkatkan profesionalitasnya sebagai jurnalis yang juga bagian dari masyarakat jurnalis di dunia. ●



# JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERS TETAP SEMBILAN ORANG

Jumlah anggota Dewan Pers untuk periode 2022-2025 masih tetap sembilan orang dengan komposisi tiga orang mewakili organisasi wartawan, tiga orang mewakili organisasi perusahaan pers dan tiga orang mewakili publik.

Demikian salah satu kesimpulan pertemuan antara Dewan Pers dengan konstituen Dewan Pers yang dilakukan secara daring hari Jumat (16/7). Pertemuan diadakan untuk mendengarkan masukan dari konstituen dan tokoh pers terkait komposisi dan jumlah anggota Dewan Pers periode mendatang.

“Kepengurusan akan berakhir tahun depan, apakah akan ada perubahan jumlah anggota dewan pers seiring bertambahnya jumlah konstituen yang tergabung dalam Dewan Pers kita masih mendengar pendapat dari semua pihak,” ujar Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh membuka acara pertemuan virtual yang dihadiri puluhan orang.

“Formulasikan apa sebaiknya yang akan dilakukan dalam kepengurusan setelah periode 2019-2022 saat ini,” tandas Profesor yang mengawali karirnya sebagai dosen Teknik Elek-

tro ITS pada tahun 1984 ini.

Ketua Dewan Pers dua periode yakni periode 2010–2013 dan 2013–2016 Profesor Bagir Manan memberikan saran agar dalam mengambil keputusan untuk mengubah statuta Dewan Pers tentang jumlah anggota Dewan Pers hendaknya mempertimbangkan prinsip manajemen efisien dan efektif selain juga mempertimbangkan keadaan saat ini yang mana pemerintah memfokuskan anggaran negara untuk mengatasi pandemi COVID-19.

“Sejak didirikan Dewan Pers, sudah disepakati 9 Anggota Dewan Pers sesuai dengan perwakilan kelompok, yakni Pekerja Media (Wartawan), Pengusaha Media dan Masyarakat. Jangan karena alasan memberikan kepuasan pada semua pihak kita mengubahnya,” ujar Profesor yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 18 Mei 2001 - 31 Oktober 2008 ini.

Menurutnya, dengan bertambahnya konstituen bukan berarti harus pula bertambah jumlah Anggota Dewan Pers. “Tidak semuanya harus jadi anggota Dewan Pers, justru bisa menjadi wadah bagi konstituen dan bukan hanya mewakili interest ter-

tentu. Namun juga sebagai komunal bersama,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pers Periode 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo menjelaskan pada praktiknya mengumpulkan sembilan Anggota Dewan Pers dalam rapat sebuah keputusan bukanlah hal yang mudah apalagi jumlahnya lebih dari itu.

“Unsur keterwakilan harus ada dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga semua anggota mesti hadir dalam rapat pengambilan keputusan, nah kesulitannya adalah Anggota Dewan Pers ini juga masih bekerja pada instansi dan usahanya masing-masing karena mereka memang tidak digaji,” ungkap Yosep Adi Prasetyo yang dipanggil akrab Stanley yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua dan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2012 ini.

“Jadwal piket Anggota Dewan Pers saja mesti harus dipenuhi jam kerjanya. Bahkan sekretariat juga mendukung dengan menyediakan kantor bagi sembilan Anggota Dewan Pers. Jika jumlahnya bertambah maka anggaran tentunya akan menyesuaikan,” tambah Stanley yang juga pernah sebagai Direktur Eksek-



ANGGOTA DEWAN PERS  
PERIODE 2019-2022.  
FOTO: DEWAN PERS

kutif Institut Studi Arus Informasi (ISAI) ini.

Selain itu juga, Tokoh Senior Pers lainnya seperti Bambang Harymurti, Margiono dan Wina Armada, Konstituen dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnails Independen (AJI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) juga searah dengan pendapat bahwa anggota Dewan Pers cukup sembilan orang saja.

Disisi yang lain, Ninok Leksono Anggota Dewan Pers periode 2013-2016 menyampaikan bahwa Dewan Pers akhir-akhir ini menjadi sorotan karena adanya aspirasi yang tumbuh dan gugatan validitas terkait uji kompetensi wartawan dan lainnya. Dalam hal tersebut, Dewan Pers diharapkan mempunyai visi mengindera permasalahan dimensi *wisdom* yang lebih luas bukan sekedar *journalism* dan

masalah organisatoris. “Dalam era *post truth* pada faktanya Dewan Pers bisa didatangi oleh orang-orang yang ngotot oleh perspektifnya sendiri, kebenaran tidak berdasar fakta obyektif namun menurut banyak orang,” ujar Ninok Leksono yang juga Rektor Universitas Multimedia Nusantara.

## USULAN

Dalam pertemuan ini muncul suara yang menginginkan perubahan statuta, salah satunya disuarakan oleh Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia Wenseslaus Manggut atau yang akrab dipanggil Wens Manggut. “Kita tidak boleh abai dengan perkembangan, kalau dulu bisnis perusahaan pers hanya ratusan sekarang juga bersaing dengan industri teknologi dunia yang juga mencari untung dari informasi,” ujar Wens yang terpilih menjadi Ketua Umum AMSI periode 2017-2020.

Menurutnya, jumlah sembilan

Anggota Dewan Pers itu cukup ataukah terlalu banyak perlu dirumuskan tantangan itu selain ada wewenang yang perlu didistribusikan. Bukannya konstituen itu ketemu dengan Dewan Pers karena perkara yang diadakan saja. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia yang juga menyampaikan keinginannya agar ada perubahan dalam statuta Dewan Pers.

“Media Digital berkembang begitu cepat dan komunitasnya banyak. Bagaimana kami memperjuangkannya. Kami ingin setiap konstituen usulkan calon anggota Dewan Pers atau konstituen masuk dalam kelompok kerja,” ujar Firdaus yang terpilih sebagai Ketua Umum SMSI pada periode 2019-2024. Hal senada juga disampaikan oleh M. Rafiq dari Sekretaris Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional yang juga menginginkan perubahan jumlah anggota Dewan Pers. • (Imam Suwandi)

# TADEX

## INGIN JADI ANGIN SEGAR MODEL BISNIS PERIKLANAN DIGITAL

Jakarta, Dewan Pers

**D**alam era disrupsi informasi media mainstream menghadapi tantangan kedepan yang sangat berat karena berhadapan dengan hadirnya sosial media dan raksasa teknologi dunia. Ekosistem media khususnya di Indonesia mengalami perjuangan untuk bisa terus eksis dan bertahan dari efek ekonomi yang juga disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Tanah Air Digital Exchange (TADEX) berharap membawa harapan dalam mengatasi tantangan itu.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dewan Pers dan *task force media sustainability* bersama Telkom Group dan Telkomsel Group serta Komunitas Insan Pers menggelar acara Tanah Air Digital Exchange (TADEX) secara daring yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir serta jajaran pimpinan Telkom Group dan Telkomsel Group juga Forum Pemred, para publiser dan *advertiser* pada Selasa (29/6) siang.

“Karya anak bangsa ini harus kita dukung dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong ekosistem digital yang inklusif membangun periklanan digital yang inovatif dan transparan dengan tetap mengedepankan kualitas penyampaian pesan ke publik,” ujar Presiden dalam sambutannya secara virtual.

Diharapkan TADEX akan memberikan angin segar karena menawarkan model bisnis periklanan digital berkelanjutan. Membuka

banyak peluang baru yang bermanfaat bagi advertiser, publisher dan pemangku kepentingan lainnya.

“Untuk merebut peluang di era disrupsi kita harus mampu menciptakan solusi inovatif dengan mengembangkan spirit, smart digital preneur untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi digital di tanah air,” lanjut Jokowi.

Untuk merebut peluang di era disrupsi kita harus mampu menciptakan solusi inovatif dengan mengembangkan spirit, smart digital preneur untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi digital di tanah air.

“Saat ini kontribusi ekonomi digital terhadap PDB masih relatif kecil baru 4% dari PDB Indonesia ini artinya kita harus berlari lebih cepat lagi sehingga tahun 2025 kita bisa menguasai sekitar 40% dari total potensi ekonomi digital ASEAN dan tahun 2030 ekonomi digital Indonesia bisa berkontribusi 18% dari PDB Indonesia,” pungkaskan Jokowi.

Kehadiran TADEX menjadi momentum penting untuk melahirkan lompatan-lompatan baru menciptakan ekosistem digital yang lebih baik menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia tenggara.

### SINERGI

Senada dengan sambutan Presiden Joko Widodo, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh juga menekankan bahwa kerjasama, sinergi, konvergensi itu bisa membuktikan menggeser dari impossibility menjadi possibility.





**A** PELUNCURAN ACARA TANAH AIR DIGITAL EXCHANGE (TADEX) YANG DI SIARKAN SECARA LIVE MELALUI YOUTUBE PADA SELASA (29/6).  
FOTO: DEWAN PERS

Yang tadinya dianggap tidak mungkin menjadi kemungkinan.

Kehadiran TADEX ini akan menjadi platform global. Sehingga tidak hanya melayani yang ada di dalam negeri sendiri tetapi kita mampu bersaing dengan dunia yang berkembang sekarang ini.

“Kalau kita melihat *track record* dari Telkom Group dan seterusnya akan banyak yang didapatkan oleh Telkom yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Di wilayah mungkin inilah kita transformasi menjadi realitas,” ujar M Nuh dalam sambutannya.

Kehadiran TADEX ini bukan sekedar tempat untuk *advertise*, lebih dari itu “bahwa kita membuktikan kalau kita bisa jika bersama-sama melakukan konvergensi, bersama-sama melakukan sinergi”.

“Kalau kita ikuti kita ini masih pada fase kedua yaitu sebagai *supporting* dan *driving*. Tetapi kita ingin menaikkan posisi kita yaitu sebagai enabler posisi pemungkin,” lanjut M

*“Karya anak bangsa ini harus kita dukung dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong ekosistem digital yang inklusif membangun periklanan digital yang inovatif dan transparan dengan tetap mengedepankan kualitas penyampaian pesan ke publik.”*

Nuh bersemangat. Dewan pers dan komunitas media sungguh sangat yakin bisa membuat platform yang mampu bersaing tidak hanya dalam negeri tapi juga memberikan solusi pada dunia ini.

“Kehadiran TADEX ini justru kita akan membangkitkan *awareness* kita, kepedulian kita tentang data yang berseliweran begitu banyak di negeri ini. Kita coba kelola dengan baik oleh anak bangsa sendiri oleh pengusaha kita sendiri. Sehingga kekayaan yang luar biasa ini tidak lari kemana-mana manfaatnya justru akan kita manfaatkan sebaik-baiknya,” tandas M Nuh.

TADEX platform awal yang nanti menjadi platform global tidak hanya untuk urusan dunia media tetapi juga akan bisa melayani seluruh kepentingan bangsa dan tanah air. “Namanya sudah sangat indah yaitu Tanah Air Digital Exchange. Kita lakukan ini bukan urusan biasa tetapi urusan yang mempunyai makna kebangsaan kenegaraan yang luar biasa,” pungkas Ketua Dewan Pers. • (Imam Suwandi)

# PERSIAPAN ANUGERAH DEWAN PERS 2021

Jakarta, Dewan Pers

**P**ada akhir bulan Juli telah dirumuskan sejumlah panduan dalam mempersiapkan program Anugerah Dewan Pers 2021 yang rencananya digelar bulan Desember. Anugerah Dewan Pers akan memberikan penghargaan kepada wartawan, media massa, lembaga dan juga provinsi yang memberikan kontribusi terhadap tegaknya kemerdekaan pers di Indonesia.

Sebelum rumusan rencana Anugerah Dewan Pers ini diajukan, telah diadakan tiga pertemuan dengan tokoh pers, kongsitusen Dewan Pers, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya pada bulan Juni dan Juli. Kemudian berbagai usulan ini diformulasikan dalam sebuah dokumen yang akan menjadi landasan dalam pemberian Anugerah Dewan Pers.

Dalam latar belakang perlunya anugerah Dewan Pers ini dijelaskan bahwa, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting untuk menciptakan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Oleh karena itulah kedudukan pers penting dalam memajukan kehidupan demokrasi di Indonesia. Pers yang independen akan menjadi ruang bagi publik dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan hati Nurani. Dengan kata lain pers dapat menjadi saluran publik untuk menyampaikan keadilan dan kebenaran yang diperlukan dalam memajukan bangsa dan negara.

Dijelaskan pula bahwa dengan kedudukan pers di Indonesia yang penting, maka pers perlu menjaga fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Dari empat fungsi inilah pers kemudian diharapkan mampu tidak hanya mencerdaskan bangsa namun juga memainkan peran penting dalam membangun demokrasi. Pers dapat menjadi pemberi informasi yang dibutuhkan terutama ketika bangsa ini menghadapi berbagai tantangan.

Pers juga menjadi media pendidikan yang dapat memperkuat pembangunan budaya bangsa. Pers juga berfungsi sebagai media yang memberikan hiburan



**A** DEWAN PERS BERSAMA DENGAN KONSTITUEN, TOKOH PERS DAN AKADEMISI MENGADAKAN PERTEMUAN MEMBAHAS PROGRAM ANUGERAH DEWAN PERS 2021 SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA KAMIS (6/7). FOTO: DEWAN PERS

kepada publik untuk menciptakan kebahagiaan yang menyeluruh. Demikian juga sebagai media yang memberikan kontrol sosial, pers diperlukan memberikan masukan dan kritiknya kepada pemerintah maupun para pemangku kepentingan termasuk kalangan masyarakat.

Rencana pemberian Anugerah Dewan Pers juga menyebutkan, yang tidak kalah pentingnya, dalam menjalankan fungsi pers itu, lembaga media dan para wartawannya melaksanakannya dengan dedikasi dan sikap professional. Di tengah kemajuan teknologi informasi maka dedikasi diperlukan karena kedudukan pers dalam membangun demokrasi di Indonesia. Sikap professional wartawan juga diperlukan agar karya-karya jurnalistiknya tidak hanya memiliki nilai bagi kepentingan publik tetapi juga diproduksi sesuai kaidah professional dan kode etik jurnalistik.

Selanjutnya rencana Anugerah Dewan Pers ini diharapkan dapat mendorong media, wartawan, dan

*Demikian juga sebagai media yang memberikan kontrol sosial, pers diperlukan memberikan masukan dan kritiknya kepada pemerintah maupun para pemangku kepentingan termasuk kalangan masyarakat.*

lembaga atau perorangan ikut bahu membahu dalam meningkatkan kualitas dari kemerdekaan pers. Dengan adanya kegiatan untuk mengapresiasi para pihak ini diharapkan juga mendorong peningkatan semua aspek dari kehidupan pers di Indonesia. Diharapkan pula lembaga media pro aktif dalam kegiatan pendataan pers – karena amanat dari UU Pers No 40 Tahun 1999 – wartawannya meningkatkan kompetensi dan para pihak non pers juga ikut membangun pers yang independen dan berkualitas.

Dalam dokumen itu disebutkan pula rencananya Kategori Anugerah Dewan Pers terdiri dari media cetak, media radio, media televisi, media siber, media di sejumlah provinsi, lembaga dan perorangan serta provinsi. Dewan juri rencananya akan terdiri dari anggota Dewan Pers, Tokoh Pers, Konstituen Dewan Pers dan Akademisi. Proses seleksinya direncanakan selama beberapa bulan sebelum Desember 2021. • (Asep Setiawan)



# UPAYA MELANJUTKAN MOU DEWAN PERS DAN KEPOLISIAN RI

Oleh: **JUNI SOEHARDJO**  
TENAGA AHLI DEWAN PERS

**M**oU (Memorandum of Understanding) atau Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Dewan Pers telah ditandatangani 9 Februari 2017 dan berlaku selama lima tahun. Dalam upaya menjaga MoU tersebut diadakan pertemuan antara kedua belah pihak sebelum habis masa berlakunya 9 Februari 2022.

Inti dari MoU tersebut adalah merupakan kesepahaman bahwa semua perkara yang berkaitan dengan

jurnalistik dan produknya akan ditangani sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tidak menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pun Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Masalah tentang pidana wartawan ini sudah sering dibicarakan oleh kalangan penggiatnya utamanya yang mengelola media siber.

Menurut Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/III/2012 definisi media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Sehingga seringkali para kuasa hukum dalam beracara membawa kepentingan kliennya menggunakan Undang-undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering dikenal dengan Undang-undang ITE.

## TANGGUNG JAWAB MEDIA

Berbagai kasus pidana yang menjerat para wartawan kesemuanya menggunakan pasal-pasal yang diamanatkan di dalam Undang-undang ITE. Mengingat wartawan adalah profesi yang mandiri dan memiliki unsur penugasan dan kurasi oleh pimpinan kantor media dan ruang redaksi, maka bentuk pertanggung jawaban dari suatu berita ada pada bahu Penanggung Jawab kantor media terkait. Unsur pertanggungjawaban ini mengharuskan ditemukan dan ditangani sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Dewan Pers selaku badan swaregulasi bidang jurnalisme di Indonesia. Penggunaan pasal-pasal pidana Undang-undang ITE yang sering menjadi laporan kepada Dewan Pers jelas bertentangan dengan kemerdekaan pers karena semua hal yang diberitakan diperlakukan menjadi persoalan pribadi.

Dalam rangka menjaga kemerdekaan pers dan penegakan hukum yang sesuai dengan kondisi yang kondusif di dunia jurnalisme, maka Kepolisian



▲ DEWAN PERS DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MENGGELAR PERTEMUAN DALAM RANGKA “MENINDAKLANJUTI SKB 3 MENTERI TERKAIT UU ITE” SECARA DARING YANG DIHADIRI KETUA DEWAN PERS MOHAMMAD NUH DIDAMPINGI 8 ANGGOTA DEWAN PERS BERTEMU DENGAN KABARESKRIM POLRI KOMJEN POL AGUS ANDRIANTO DIDAMPINGI KADIVHUMAS POLRI SERTA JAJARAN PETINGGI LAINNYA PADA JUMAT (30/7). FOTO: DEWAN PERS

Republik Indonesia bekerja sama dengan Dewan Pers mengadakan pertemuan daring untuk membicarakan perkembangan masa mendatang.

Di dalam pertemuan daring yang diadakan pada 30 Juli 2021 M NUH selaku Ketua Dewan Pers meminta agar semua pihak memahami adanya kompleksitas sosial dimana perkembangannya lebih cepat daripada kondisi pemahaman kita. Faktor kedua adalah bahwa persepsi dari publik akan menentukan keberhasilan penanganan permasalahan yang sedang dihadapi bersama antara penegak hukum dengan para wartawan.

## PENYELESAIAN KASUS PERS

Sebagai narasumber dari Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, Anggota Dewan Pers dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, mengedepankan penyelesaian sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers apabila perkara tersebut berkaitan dengan produk jurnalistik, baik melalui media cetak, media online, media elektronik, baik

televisi mau pun radio. Selain itu ia juga mengingatkan agar dalam hal kasus sengketa pers semua perkara dilimpahkan kepada Dewan Pers sesuai dengan amanat Undang-undang Pers.

M Agung Dharmajaya juga menyebutkan perlunya Kepolisian Republik Indonesia dan Dewan Pers dapat melakukan evaluasi bersama Dewan Pers dan membentuk Tim Perumus MoU dan kerja sama yang lebih konkret lagi dalam bentuk PKS atau Perjanjian Kerja Sama sebelum daluwarsa waktu berlakunya MoU yakni Februari 2022.

Mendukung informasi dan data dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Arif Zulkifli, Anggota Dewan Pers dan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, menyatakan bahwa setiap tahunnya, terdapat 700 (tujuh ratus) pengaduan masuk ke Komisi Pengaduan Dewan Pers. Sekitar 65% hingga 96% dari pengaduan tersebut adalah pelanggaran etika setelah dianalisa dan diputuskan oleh Dewan Pers.

Semua pelanggaran etika umum-

nya berkaitan dengan pelanggaran kaidah-kaidah jurnalisme yakni tidak adanya verifikasi, tidak adanya konfirmasi, penggunaan judul-judul berita yang bersifat menghakimi dan seterusnya. Selama ini perusahaan media sudah menyadari bahwa hal ini bisa dihindari dan pada dasarnya dapat diselesaikan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

## KEPEDULIAN PERS

Dari pihak Kepolisian Republik Indonesia ada tiga pejabat yang mengajukan beberapa masalah yang berkaitan dengan jurnalistik. Komisaris Jenderal (Polisi) Agus Andrianto dari Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa kesenjangan yang terjadi di masyarakat akibat persepsi itu merupakan bagian dari monitoring dan pengawasan yang sudah dijalankan dan bahkan wajib ditingkatkan.

Komjen Agus Andrianto berpendapat bahwa peran pers dalam mendukung program pemerintah dengan mengedukasi masyarakat serta turut

serta memonitor dan mengawasi pelaksanaan penanganan COVID-19 melalui vaksinasi, merupakan suatu keperdulian pers yang dapat diaplikasikan di bidang jurnalistik.

Pejabat Kepolisian Republik Indonesia berikutnya adalah Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Komisaris Jenderal (Polisi) Rykco Amelza Daniel mengatakan bahwa hubungan antara polisi dengan media sesungguhnya merupakan hubungan fungsional di dalam sistem kenegaraan, bermasyarakat, dan berbangsa. Pemrosesan informasi yang benar dan jelas juga merupakan upaya penegakan demokrasi, sekaligus merupakan bahan keadilan, dan menunjukkan supremasi hukum dalam pembangunan nasional. Ia menyatakan bahwa hubungan polisi dengan media adalah hubungan yang merupakan suatu simbiosis mutualisme. Ia juga memberikan pemutakhiran bahwa saat ini di Kepolisian Republik Indonesia sudah dibentuk kurikulum baru yang disebut Kurikulum Revisi. Salah mata kuliahnya adalah pelajaran tentang polisi dan media yang merupakan suatu upaya pembelajaran komunikasi sosial di antara keduanya.

Kepolisian Republik Indonesia meminta agar Dewan Pers, dalam hal ini baik Profesor Mohammad Nuh dan Anggota Dewan Pers lainnya, untuk memberikan daftar para praktisi yang dapat memberikan komunikasi tersebut. Rencananya Pendidikan ini akan diberikan kepada siswa Polri di semua jenjang Pendidikan seperti Tamtama, Bintara, Perwira dan sebagainya.

## PEMBAHARUAN KERJASAMA

Komisaris Jenderal (Polisi) Rykco Amelza Daniel juga menyebutkan bahwa pembaharuan kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Dewan Pers perlu memperhatikan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga Institusi Republik Indonesia tentang Undang-undang ITE, yakni antara Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Di dalam SKB tersebut sudah ada

arahan agar penegak hukum menggunakan asas *ultimum remedium* bagi berbagai perkara yang menyeruak di kalangan masyarakat yang menggunakan pasal-pasal pada Undang-undang ITE. Kunci utama dari pelaksanaan SKB tentang Undang-undang

*Inti dari MoU tersebut adalah merupakan kesepakatan bahwa semua perkara yang berkaitan dengan jurnalistik dan produknya akan ditangani sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tidak menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pun Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

ITE tersebut adalah peningkatan upaya preventif pemidanaan dengan mempelajari berbagai sudut pandang konten yang berpotensi menimbulkan gejala atau konflik.

Langkah berikut penegak hukum adalah untuk melakukan tahap

edukatif dimana para pihak diminta untuk saling memaafkan agar tidak berujung ke pengadilan. Pendeknya pers diminta turut membentuk budaya beretika demi mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

Narasumber Polri berikutnya adalah Inspektur Jenderal (Polisi) Argo Yuwono, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam presentasi verbalnya, Irjen Argo Yuwono menyatakan agar ada kegiatan bersama media yang berkantor di Dewan Pers. Diharapkan adanya kegiatan *liaison* antara kedua pihak ini menjadi suatu kegiatan yang meningkatkan silaturahmi dimana misalnya satu orang Komisaris Besar memiliki jejaring dengan 3-4 perusahaan media. Pelatihan seperti ini sudah dipraktekan dengan memberikan pelatihan peliputan penanganan COVID-19, peliputan konflik, ataupun yang berpotensi menimbulkan chaos (keributan).

Pada bagian akhir, Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal (Polisi) Agus Andrianto menyatakan bahwa media online saat ini yang mencapai angka 40.000 – 50.000 memerlukan verifikasi Dewan Pers dalam rangka memastikan status wartawan yang kemungkinan akan bersengketa. Hal ini berkaitan dengan kartu identitas wartawan apabila mendapatkan permasalahan dan karenanya polisi dapat segera menangani kasus yang masuk sebagai kasus pers saat mendapatkan bukti kartu identitas tersebut.

Agus Sudibyo, Anggota Dewan Pers dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional, selaku moderator selama berlangsungnya acara ini kemudian memberikan kesimpulan agar Kepolisian Republik Indonesia dan Dewan Pers segera melakukan tindakan yang sesuai dengan mekanisme koordinasi utamanya dalam hal pelaksanaan SKB Undang-undang ITE serta Kerjasama pelatihan profesionalisme bagi siswa Kepolisian Republik Indonesia dengan materi *media relations* dan *media handling* serta azas dan kaidah Kode Etik Jurnalistik.●



# PEMBEKALAN DAN PENYEGARAN JURNALISME TELEVISI UNTUK TINGKATKAN KUALITAS PRODUK KARYA JURNALIS PROGRAM FJPP



**A** KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH MENGHADIRI ACARA PEMBEKALAN PESERTA FELLOWSHIP JURNALISME PERUBAHAN PERILAKU (FJPP) DALAM MELIPUT KEBIJAKAN PPKM DARURAT SECARA DARING DARING MELALUI ZOOM MEETING KAMIS (8/7). FOTO: DEWAN PERS

Jakarta, Dewan Pers

Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo sekaligus inisiator Fellowship Journalism Perubahan Perilaku (FJPP) menekankan pentingnya kualitas laporan jurnalistik dari para wartawan di lapangan. Pentingnya kualitas itu berkaitan dengan tujuan dari laporan jurnalistik itu sendiri yakni perubahan perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19.

“Program ini jangan jadi sekadar Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk wartawan. Secara programatik harus bisa dipertanggungjawabkan untuk menjaga kualitas jurnalisme kita. Untuk itu, perlu peningkatan standard dan *Key Performance Indicators* (KPI),” ujar Agus membuka

sambutannya pada acara pembekalan peserta yang diikuti secara daring oleh ribuan wartawan pada Jumat (30/7) siang.

Pelatihan dan briefing berseri bagi peserta FJPP akan berlangsung secara berkala dan bergantian sesuai dengan kompetensi medianya yakni media televisi, radio, cetak maupun siber. Dijadwalkan pula, adanya pelatihan bersama dari semua platform media.

“Hal ini adalah momentum kita untuk diskusi dan *refreshing* terkait dengan produksi, peliputan dan lain-lain yang intinya dari sisi Dewan Pers dan satuan tugas penanganan pandemi COVID-19 semakin meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia,” kata Agus.

“Kegiatan ini, untuk selanjutnya tidak cuma jadi *refreshing* terkait kode etik dan produksi karya jurnalistik, melainkan juga tempat mendiskusikan catatan yang muncul dari teman-teman editor maupun peserta. Semoga kedepannya konten yang dihasilkan FJPP dapat mengalami peningkatan,” lanjutnya.

Program Fellowship Journalism Perubahan Perilaku ini diikuti 3050 wartawan dari perwakilan berbagai provinsi seluruh Indonesia. Program ini menggunakan anggaran negara yang tidaklah sedikit sehingga perlu keseriusan semua pihak untuk sukseskannya.

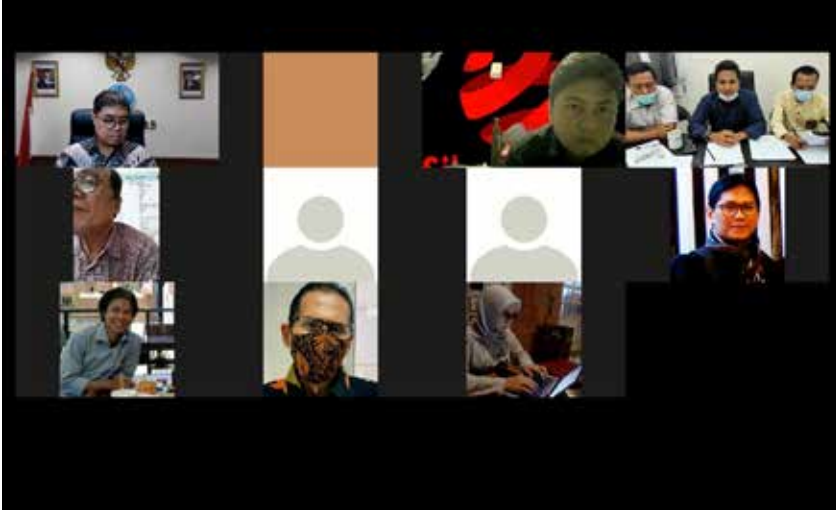
Pada kesempatan kali ini pemateri yang ikut mengisi adalah para senior dan tokoh pers dipandu oleh moderator Subekti diantaranya Imam Wahyudi Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) periode 2005-2012 yang juga pernah menjadi Anggota Dewan Pers 2016-2019 yang menyampaikan materi menulis berita televisi.

Endah Saptorini yang merupakan kurator dan editor senior pernah menjadi Senior Editor Bloomberg TV Indonesia dan beberapa stasiun tv swasta nasional lainnya seperti SCTV, Metro TV dan Trans TV yang memaparkan *Digital Storytelling* bentuk format baru dari berita digital atau online media dan televisi bagaimana membuat berita menjadi sebuah cerita yang menarik meski secara daring langsung dari London.

Praktisi Media yang juga sebagai dosen M. Gafar juga berbagi paparan teknis mengenai *Mobile Journalism*. Narasumber terakhir yakni Ratna komala yang pernah menjadi Anggota Dewan Pers periode 2016-2019 yang membahas karya dari peserta FJPP.

“Sekadar untuk menggambarkan, program delapan bulan ini bernilai Rp. 38,7 miliar, lebih besar daripada anggaran tahunan Dewan Pers. Mohon penggunaan dana publik ini dapat benar-benar bermanfaat untuk mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat di masa pandemi dan menjaga kualitas jurnalisme sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.” imbuh Agus. • (Imam Suwandi)

# SEBANYAK 112 KASUS PERS DISELESAIKAN JULI 2021



ANGGOTA DEWAN PERS, ASEP SETIAWAN MENGHADIRI MEDIASI ANTARA ADE KURNIA DAN SIBERZONE.ID SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA SELASA, (6/8). FOTO: DEWAN PERS

Sepanjang Juli 2021 Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers telah menyelesaikan 112 kasus pers, 9 kasus merupakan penyelesaian kasus tahun 2020 dan 103 kasus penyelesaian kasus tahun 2021.

Di tengah pandemi yang masih mengganas, Dewan Pers menyelesaikan sengketa pemberitaan pers dengan surat menyurat ataupun menggelar mediasi melalui aplikasi Zoom. Hasilnya apabila para pihak setuju dengan penilaian Dewan Pers maka dibuat Risalah Penyelesaian Pengaduan. Sementara bila tidak dicapai kesepakatan diantara para pihak, Dewan Pers – seperti biasanya – mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang diputuskan melalui sidang pleno Dewan Pers.

Dalam periode ini perlu dicatat adanya 15 media diadukan sekaligus ke Dewan Pers. Pengaduan ini dilaku-

kan Mubinoto Amy yang dilayangkan pada pekan terakhir Juni 2021, kemudian ditindaklanjuti oleh Dewan Pers pada Juli 2021. Pengadu bertindak atas nama Pengelola Cafe Laguna, Penjaringan, Jakarta Utara. Berita yang diadukan pada intinya berisi informasi bahwa ada dua cafe plus karaoke di Apartemen Laguna, Pluit, Jakarta Utara yang ramai dibicarakan publik.

Pasalnya--seperti informasi yang beredar di Whatsapp diantara awak media -- kedua cafe yang dikelola satu owner itu membuka usahanya mulai pukul 20.00--pukul 05.00 WIB dan tidak menjalankan protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi.

Menurut Pengadu, media-media tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pihaknya, sehingga diduga melanggar sejumlah pasal Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Menurut versi Pengadu, cafe itu telah menjalankan prokes ketat dan membuka

cafenya sesuai ketentuan Pemprov DKI Jaya.

Setelah dianalisis oleh Dewan Pers, sebagian media yang diadukan itu telah mencoba melakukan klarifikasi kepada pihak terkait seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, Arifin, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Utara, Yusuf Majid, namun tidak kepada Pengadu langsung, sehingga media-media itu melanggar Kode Etik Jurnalistik 1 dan 3 Kode etik jurnalistik karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan beropini menghakimi serta tidak memenuhi ketentuan Angka 2 huruf a dan b, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

Terkait hal itu, Dewan Pers merekomendasikan agar Pengadu mengirim Hak Jawab/Hak Koreksi langsung kepada Teradu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah menerima penilaian Dewan Pers. Kemudian media-media itu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.

Selain itu, Pengadu dan media-media wajib mengacu kepada Pedoman Hak Jawab Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan-DP/X/2008). Kemudian media-media itu wajib memuat catatan di bawah berita yang diadukan yang menjelaskan bahwa berita bersangkutan dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik, disertai tautan berita yang berisi Hak Jawab dari Pengadu. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam waktu yang ditentukan maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab.

Terkait hal itu, Dewan Pers juga perlu mengingatkan kepada media-media bahwa tidak melayani Hak Jawab dapat dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. • (Sekr.Kom. Pengaduan)

# DEWAN PERS LAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL SECARA HIBRID



## PESERTA VERIFIKASI JULI 2021

Benuanta	Jalan Gajah Mada, RT 31, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
Benuanta.co.id	Jalan Gajah Mada, RT 31, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
Tobapos.co	Jalan Geperta Ujung Gang Martebe No. 12, Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia
Suaraborneo.com	Jl Trans Kalimantan Komplek Grand Purnama 2 Blok F Purnama 21 No.153
Media Sinergi	Jl Sawerigading Hunian HS Sawerigading Blok B No. 8 Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi selatan
mediasinergi.co	Jl Sawerigading Hunian HS Sawerigading Blok B No. 8 Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi selatan
gerbangindonesia.co.id	Jalan Pelikan No 07, Pajang Timur, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83127
mitanews.com	Jln. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara 22763
infobank.com	Jalan Sultan Iskandar Muda No.123 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan 12240

Sumber: Tim Pendataan Dewan Pers

**S**elama bulan Juli 2021, Dewan Pers melakukan verifikasi faktual sejumlah media di daerah seara hibrid atau disebut juga verifikasi faktual virtual. Pada saat normal, verifikasi faktual dilakukan Dewan Pers dengan berkunjung langsung ke lokasi dimana media berada namun saat pandemi dilakukan secara hibrid. Artinya, verifikasi dilakukan disaksikan wakil dari konstituen yang ditunjuk Dewan Pers dan hadir di lokasi. Sedangkan tim verifikator Dewan Pers lainnya hadir secara daring. Dengan model hibrid selama pandemi COVID-19, media-media yang telah memenuhi syarat administrasi kemudian segera statusnya dapat menjadi terverifikasi faktual.

*Pada intinya verifikasi faktual yang dilakukan adalah untuk memastikan bahwa dokumen yang sudah disediakan sebelumnya memang ada dan sesuai dengan ketentuan.*

Sesuai amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang, fungsi Dewan Pers adalah melakukan pendataan. Amanat untuk melakukan pendataan ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan prosedur pendataan yang disebut dengan verifikasi perusahaan pers. Adanya pendataan perusahaan pers ini tidak lain adalah untuk menjaga kualitas pers Indonesia agar dapat mengikuti sejumlah amanat UU Pers seperti perusahaan pers yang berbadan hukum, adanya penanggung jawab di perusahaan pers dan mencantumkan alamat.

Selain itu dalam verifikasi itu diperiksa juga akta pendirian, tujuan dari perusahaan pers itu, kode perilaku perusahaan, tingkat kompetensi wartawan, pelaksanaan kode etik jurnalistik, kesejahteraan para wartawan dan lainnya. Pada intinya verifikasi faktual yang dilakukan adalah untuk memastikan bahwa dokumen yang sudah disediakan sebelumnya memang ada dan sesuai dengan ketentuan. Demikian juga lokasi perusahaan pers itu jelas dan memenuhi syarat sebagai sebuah media.

Berikut ini beberapa media yang mengikuti verifikasi faktual secara hibrid dimana saksi Dewan Pers hadir di lokasi.

Verifikasi dengan cara kombinasi ini masih berlanjut sampai Agustus dan bulan-bulan berikutnya karena komitmen Dewan Pers untuk meningkatkan kualitas pers di Indonesia. Berdasarkan data di Dewan Pers, dari Januari sampai Juli 2021 telah diverifikasi 163 media namun baru 110 yang media lolos verifikasi faktual. Tahun 2021 ini ditargetkan 350 media akan mengikuti proses verifikasi namun baru sebagian saja yang sudah selesai. Kondisi pandemi COVID-19 menyulitkan proses verifikasi ini karena kunjungan ke lokasi harus mengikuti protokol kesehatan baik di perjalanan maupun di tempat verifikasi.

Data perusahaan di situs dewan-pers.or.id disebutkan telah 1.644 perusahaan pers yang terdata. Laporan-laporan menyebutkan perusahaan pers di Indonesia baik cetak maupun elektronik termasuk media siber jumlahnya lebih dari 40.000 perusahaan pers. • (Asep Setiawan)





DEWANPERS

**PERATURAN DEWAN PERS  
NOMOR: 2/PERATURAN-DP/III/2021  
TENTANG  
UJI KOMPETENSI WARTAWAN AKSELERASI JENJANG UTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERS,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Pers telah menetapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan dan Peserta Uji Kompetensi Wartawan untuk mendukung dan meningkatkan profesionalisme wartawan;
  - b. bahwa terdapat tiga jenjang kompetensi wartawan secara berurutan dari terendah hingga tertinggi dengan kompetensi tertentu yaitu mulai dari Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama
  - c. bahwa Penanggung jawab Redaksi atau Pemimpin Redaksi wajib memiliki kompetensi Wartawan Utama;
  - d. bahwa karena pesatnya pertumbuhan media pers secara nasional, telah terjadi ketimpangan antara jumlah Wartawan Utama dan jumlah media yang membutuhkan penanggungjawab redaksi bersertifikat Wartawan Utama;
  - e. bahwa meski pun Dewan Pers telah membolehkan seorang Wartawan Utama menjabat sebagai pemimpin redaksi atau penanggungjawab redaksi di 2 (dua) media pers, namun kebijakan itu tetap belum mengatasi masalah kebutuhan Wartawan Utama. Akibatnya, belakangan ini banyak Wartawan Utama menjadi "pemimpin redaksi formalitas" di pelbagai media pers;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama.



# DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110  
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030  
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

## SURAT EDARAN DEWAN PERS Nomor : 01/SE-DP/VI/2021 Tentang:

### POSISI PERS DALAM SITUASI DARURAT PANDEMI COVID-19

Menyikapi situasi darurat lonjakan angka konfirmasi positif Covid-19 saat ini, Dewan Pers menyerukan peran aktif insan pers dan media massa dalam menyuarakan kebenaran dan semangat optimisme guna melawan wabah disinformasi dan misinformasi di kalangan masyarakat, di samping secara agresif terus mengampanyekan pentingnya pencegahan protokol kesehatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi).

Pandemi yang kita hadapi saat ini merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan soliditas dan kerja sama lintas sektoral. Berkaitan dengan hal tersebut, pers dan media massa harus dapat memainkan tugas utamanya; dapat secara efektif mengolah informasi dan data yang ada untuk mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan membangkitkan kembali kewaspadaan masyarakat menghadapi pandemi.

Sejalan dengan hal tersebut, sasaran kinerja pers dan media massa ke depan hendaknya tidak terbatas pada bagaimana mengawasi kinerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi dan mempersuasi perilaku masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan, namun juga sampai pada level mewacanakan turunan ataupun efek lanjutan dari peningkatan angka konfirmasi positif dan kematian akibat Covid-19 yang terjadi saat ini ke ruang publik untuk dapat dicarikan solusinya bersama-sama.

Guna menyukseskan apa yang disampaikan tersebut di atas, Dewan Pers mengimbau:

1. Kepada instansi pemerintah pusat dan daerah, selaku pengambil kebijakan, agar lebih bersungguh-sungguh dalam upaya mengatasi pandemi, dengan mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat di atas hal-hal lainnya. Di samping itu, Dewan Pers juga mengimbau agar pemerintah secara langsung turut melindungi keselamatan wartawan dengan cara tidak menciptakan kerumunan orang, menghindari terjadinya praktik wawancara *doorstop*, dan diliput oleh awak media.
2. Kepada perusahaan media, diimbau untuk mengutamakan keselamatan wartawan dan pekerjaannya dalam kegiatan jurnalistik dengan instruksi tegas untuk menaati protokol kesehatan secara ketat di lingkungan operasional serta mendukung akselerasi pemberian vaksinasi, khususnya bagi wartawan yang bertugas di lapangan. Selain itu, Dewan Pers juga mendorong agar perusahaan media sedapat mungkin menghindari pengambilan kebijakan pemutusan hubungan kerja atau *lay off* terhadap pekerjaannya demi terus berjalannya fungsi kontrol sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi genting saat ini.
3. Terakhir, kepada wartawan, agar dapat menjalankan tugas jurnalistiknya menurut kode etik yang berlaku dan lebih aktif memainkan peranan sebagai agen perubahan perilaku masyarakat dengan mempersuasi masyarakat untuk terus menaati protokol kesehatan dalam berkegiatan sehari-hari.

Jakarta, 13 Juli 2021  
Dewan Pers

  
Mohammad M. UH  
Ketua DEWANPERS



DEWANPERS

## LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2021



**SURAT**

**10**  
Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi

**28**  
Surat Undangan Mediasi

**87/97**  
Surat Keputusan/penilaian akhir/ tanggapan

**PPR: 19 PPR**

Terhadap aktualbanten.com atas pengaduan Puji Santoso

**PPR: 20 PPR**

Terhadap AktualNews.co atas pengaduan Puji Santoso

**PPR: 21 PPR**

Terhadap Kabarviral79.com atas pengaduan Puji Santoso

**PPR: 22 PPR**

Terhadap tifamaluku.com atas pengaduan Insun Sangadji

**PPR: 23 PPR**

Terhadap kabarxxi.com atas pengaduan Puji Santoso

**PPR: 24 PPR**

Terhadap siberzone.id atas pengaduan Ade Kurnia

**PPR: 25 PPR**

Terhadap mitrabantennews.com atas pengaduan RD. M. Bambang

**PPR: 26 PPR**

Terhadap jejakkasustv.com atas pengaduan CV. BMM

**PPR: 27 PPR**

Terhadap faktaberita.co.id atas pengaduan CV. BMM



### LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN JULI 2021

**Risalah No 61**  
Berinto dengan pedigital.id

**Risalah No 62**  
APTECH dengan Buser SCTV

**Risalah No 63**  
Haris S. Tome dengan gorontalo.gebraknews.co.id

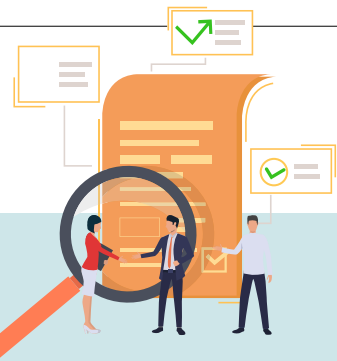
**Risalah No64**  
Djurjaeni dengan parametertodays.com



# GRAFIK DEWAN PERS

## DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN JULI 2021

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
					
Terverifikasi Administratif dan Faktual	1	0	1	17	19
Terverifikasi Administratif	5	0	0	18	23
Belum Terverifikasi	-	-	-	-	-
Media Mendata	-	-	-	-	-



### TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF DAN FAKTUAL

#### TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF

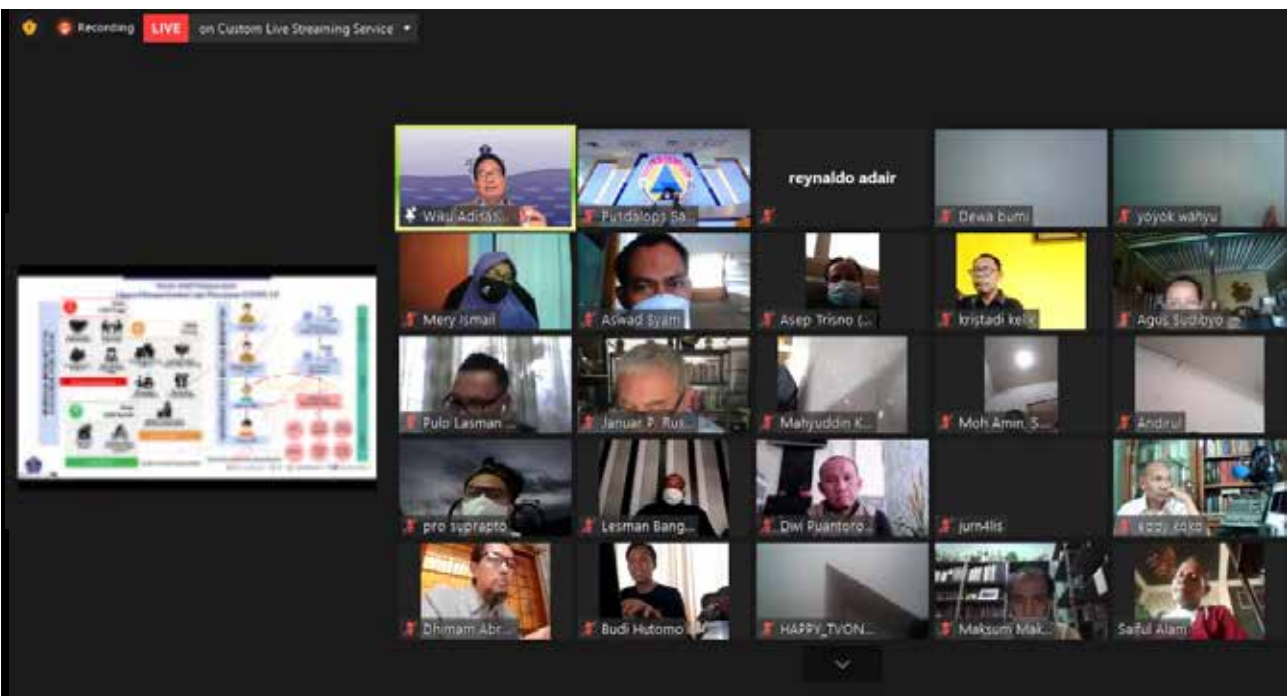
NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	Media Sinergi	Cetak	Sulawesi Selatan
2	Radarmandali	Cetak	Jawa Barat
3	Radarmakassar	Cetak	Sulawesi Selatan
4	media.alkhairaat.id	Siber	Sulawesi Tengah
5	binews.id	Siber	Sumatera Barat
6	exposidik.com	Siber	Kepulauan Riau
7	tugujatim.id	Siber	Jawa Timur
8	tugumalang.id	Siber	Jawa Timur
9	Bukamatanews.id	Siber	Sulawesi Selatan
10	Selasar.co	Siber	Kalimantan Timur
11	koranperbatasan.com	Siber	Kepulauan Riau
12	ceriatv.co.id	Siber	Riau
13	mimbaronline.com	Siber	Sumatera Utara
14	analisaaceh.com	Siber	Aceh
15	headlinealtim.co	Siber	Kalimantan Timur
16	katasiber.id	Siber	Kepulauan Riau
17	siberindo.co	Siber	DKI Jakarta
18	sinpo.id	Siber	DKI Jakarta
19	kaltimtoday.co	Siber	Kalimantan Timur
20	Tekape.co	Siber	Sulawesi Selatan
21	BETV	Televisi	Bengkulu

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	Pos Kupang	Cetak	Nusa Tenggara Timur
2	Harian Timor Express	Cetak	Nusa Tenggara Timur
3	Surat Kabar Harian Pilar	Cetak	Lampung
4	Radarmandalika.id	Siber	Nusa Tenggara Barat
5	sumsel24.com	Siber	Sumatera Selatan
6	wahanaindonesia.com	Siber	Kepulauan Riau
7	KabarSelebes.id	Siber	Sulawesi Tengah
8	kliksumatera.com	Siber	Sumatera Selatan
9	radarmalang.jawapos.com	Siber	Jawa Timur
10	radarbanyuwangi.jawapos.com	Siber	Jawa Timur
11	GoKepri.com	Siber	Kepulauan Riau
12	tabikpun.com	Siber	Lampung
13	wowbabel.com	Siber	Kepulauan Bangka Belitung
14	Cakrawala.co	Siber	DKI Jakarta
15	Warta9.com	Siber	Lampung
16	Okeyboz.com	Siber	Kepulauan Bangka Belitung
17	cnbcindonesia.com	Siber	DKI Jakarta
18	Sorot.co	Siber	DI Yogyakarta
19	jurnalisbengkulu.com	Siber	Bengkulu
20	onlinekoe.com	Siber	Lampung
21	buanapagi.com	Siber	Sumatera Utara

# GALERI DEWAN PERS



**DEWAN** Pers bekerjasama dengan Satgas Penanganan Covid-19 mengadakan pembekalan dan pelatihan untuk para peserta fellowship Jurnalisme Perubahan Prilaku (FJPP) secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (8/7). ●





## GALERI DEWAN PERS

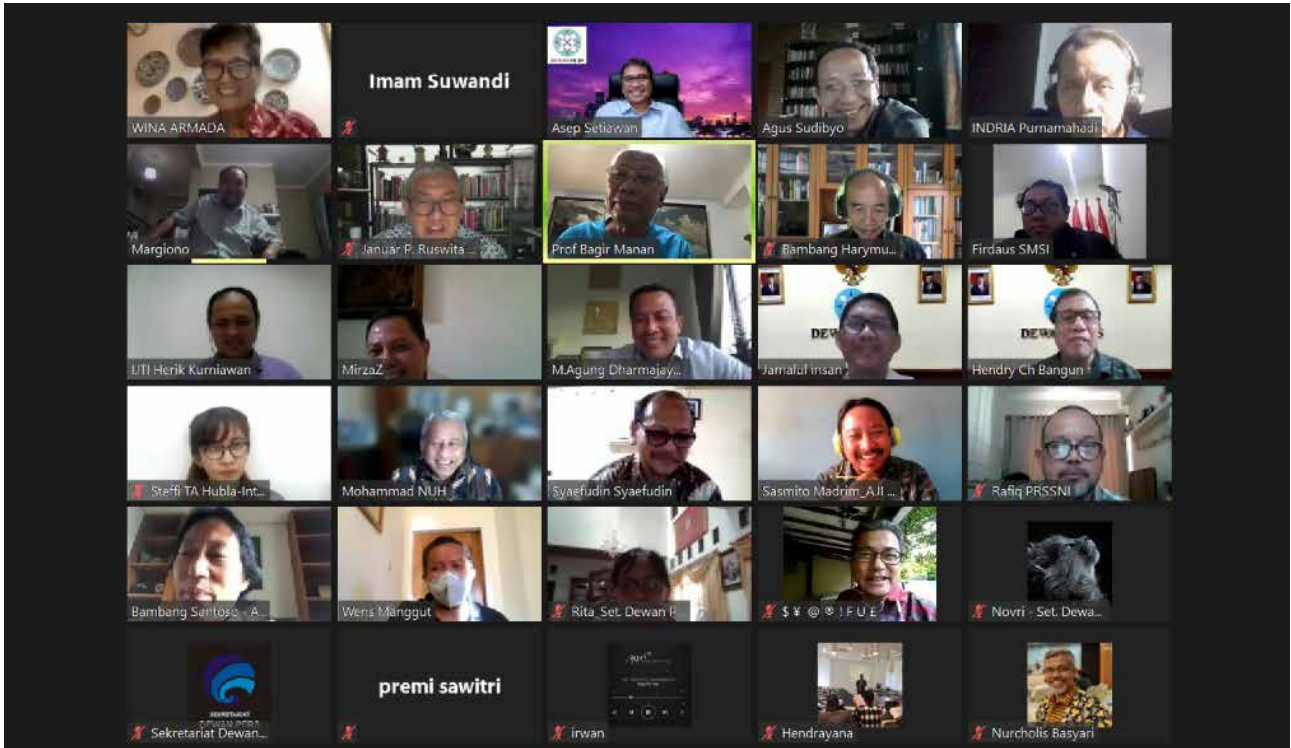


**KAPOLRI** Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya mengunjungi Vaksinasi Wartawan Dosis 1 Gelombang IV yang digelar di Bentara Budaya, Jakarta. Dalam acara tersebut juga dihadiri jajaran Pimpinan dan Redaksi Kompas Gramedia Group pada Kamis (1/7). ●





# GALERI DEWAN PERS



**KETUA** Dewan Pers Mohammad Nuh menghadiri acara Temu Konstituen dan Tokoh Pers, Dewan Pers melalui daring yang dihadiri oleh puluhan Tokoh Pers Nasional, Wartawan Senior, Para Konstituen dan Perwakilan dari berbagai insan pers pada Jumat (16/7). ●



**DEWAN** Pers bekerja sama dengan Tim Riset Universitas Multimedia mengadakan diskusi hasil survei "Persepsi Publik Terhadap Pemberitaan Covid-19 di Media" secara daring dan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Dewan Pers Jum'at (30/7). ●



# GALERI DEWAN PERS



**PELUNCURAN** Program Tanah Air Digital Exchange (TADEX) yang di siarkan secara live melalui Youtube TADEX ID pada Selasa (29/6).

